

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada akhirnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan Kota Madiun pada tahun 2022, dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan terselesaikannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun Tahun 2022 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka **Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.**

Sekian terima kasih.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

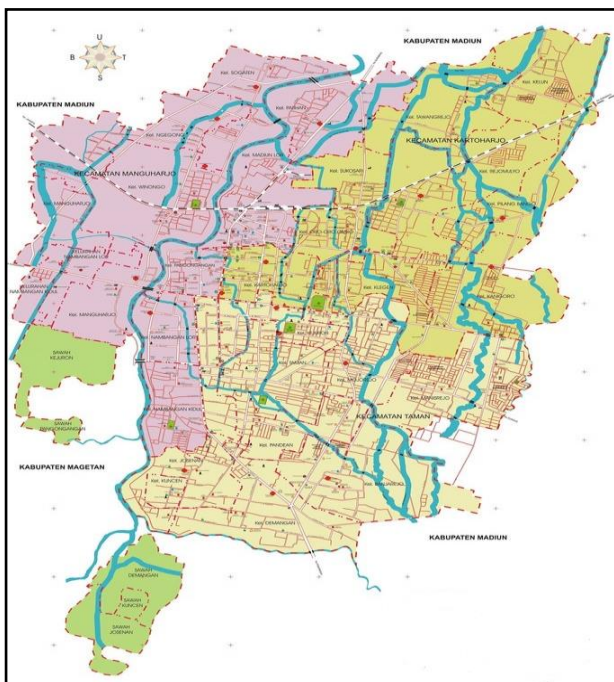
Madiun, Maret 2023

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

A. DATA UMUM DAERAH

KONDISI GEOGRAFIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur,



disebutkan bahwa Kota Madiun terletak pada 111° BT – 112° BT dan 7° LS – 8° LS. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas $33,23 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar $12,46 \text{ km}^2$ (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas $10,73 \text{ km}^2$ (32,29%), dan

Kecamatan Manguharjo seluas $10,04 \text{ km}^2$ (30,21%).

Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 325 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 396 RT dan 105 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2022 berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebanyak 201.760 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 98.944 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 102.816 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 72.717 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	29.497	30.670	60.167
2.	Taman	42.046	43.681	85.727
3.	Kartoharjo	27.401	28.465	55.866
Jumlah		98.944	102.816	201.760

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022

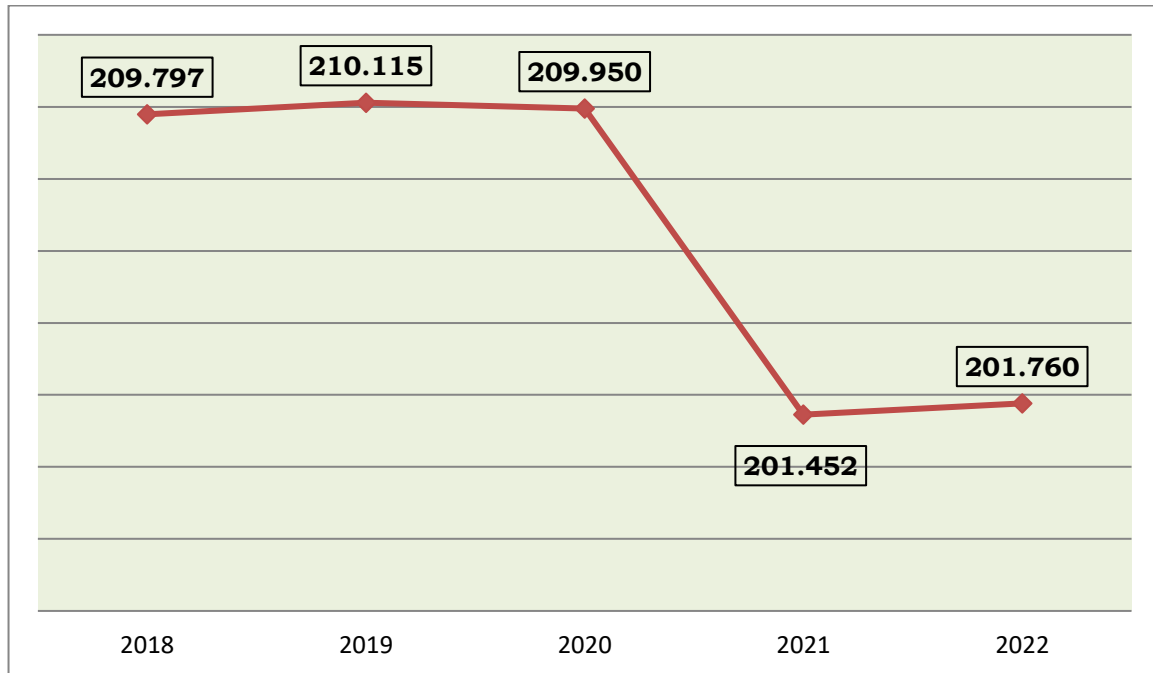
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	16.149	6.215	22.364
2.	Taman	22.507	7.841	30.348
3.	Kartoharjo	14.850	5.155	20.005
Jumlah		52.506	19.211	72.717

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	37.292
2.	Mengurus Rumah Tangga	32.468
3.	Pelajar/ Mahasiswa	40.495
4.	Pensiunan	5.611
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6.109
6.	TNI - POLRI	2.590
7.	Jasa	709
8.	Wirausaha	749
9.	Karyawan	46.748
10.	Buruh/ Tukang	4.954
11.	Wiraswasta	18.223
12.	Guru/ Dosen	2.297
13.	Agamawan	92
14.	Kesehatan	720
15.	Pedagang	2.095
16.	KDH, WKDH, DPR, DPRD	14
17.	Pekerjaan Lainnya	594
Jumlah		201.760

Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018 s.d 2022



Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

APARATUR SIPIL NEGARA

Jumlah ASN Kota Madiun menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Fungsional Tertentu	1.756
2.	Fungsional Umum	708
3.	Struktural (Eselon IV-II)	338
Jumlah		2.802

Sumber : BKPSDM Kota Madiun

Persebaran Jumlah ASN pada Perangkat Daerah



Sumber : BKPSDM Kota Madiun

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Tahun 2021 s.d. 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Tahun 2022
I	Pendapatan	1.100.682.829.130,86	1.014.637.940.454,00	1.060.716.311.084,55	104,54%
1	Pendapatan Asli Daerah	265.920.295.216,86	242.244.567.044,00	264.212.229.217,55	109,07%
	1) Pajak Daerah	87.874.777.059,32	95.000.000.000,00	106.165.312.122,76	111,75%
	2) Retribusi Daerah	17.463.721.195,00	17.835.800.007,00	21.385.348.837,00	119,90%
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	16.199.882.796,95	15.158.702.324,00	15.595.752.355,97	102,88%
	4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.381.914.165,59	114.250.064.713,00	121.065.816.201,82	105,97%
2	Pendapatan Transfer	813.126.832.914,00	772.393.373.410,00	796.504.081.567,00	103,12%
	1) Pendapatan Transfer Pusat	813.126.832.914,00	686.921.098.000,00	697.480.692.487,00	101,54%
	2) Pendapatan Transfer Antar Daerah		85.472.275.410,00	99.023.389.080,00	115,85%
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	21.635.701.000,00	-	-	-
	1) Pendapatan Hibah	0,00	-	-	-
	2) Dana Darurat	0,00	-	-	-
	3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	21.635.701.000,00	-	-	-
	Hibah Dana BOS	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi/ Pemda Lainnya	-	-	-	-

Sumber : BKAD Kota Madiun

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

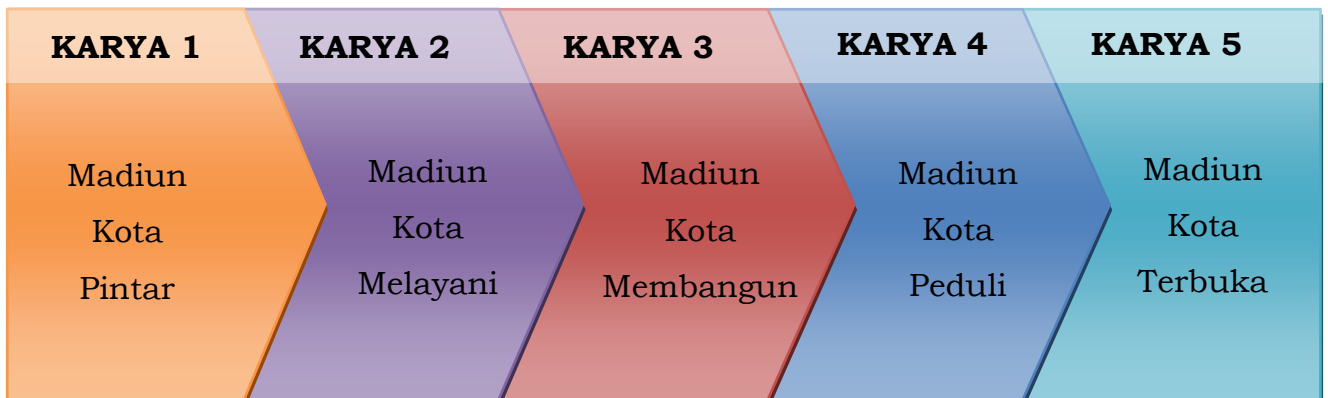
VISI

**Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa
Menuju Masyarakat Sejahtera**

MISI

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 diwujudkan dalam **Panca Karya** sebagai berikut :



Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 adalah **“Peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal”**

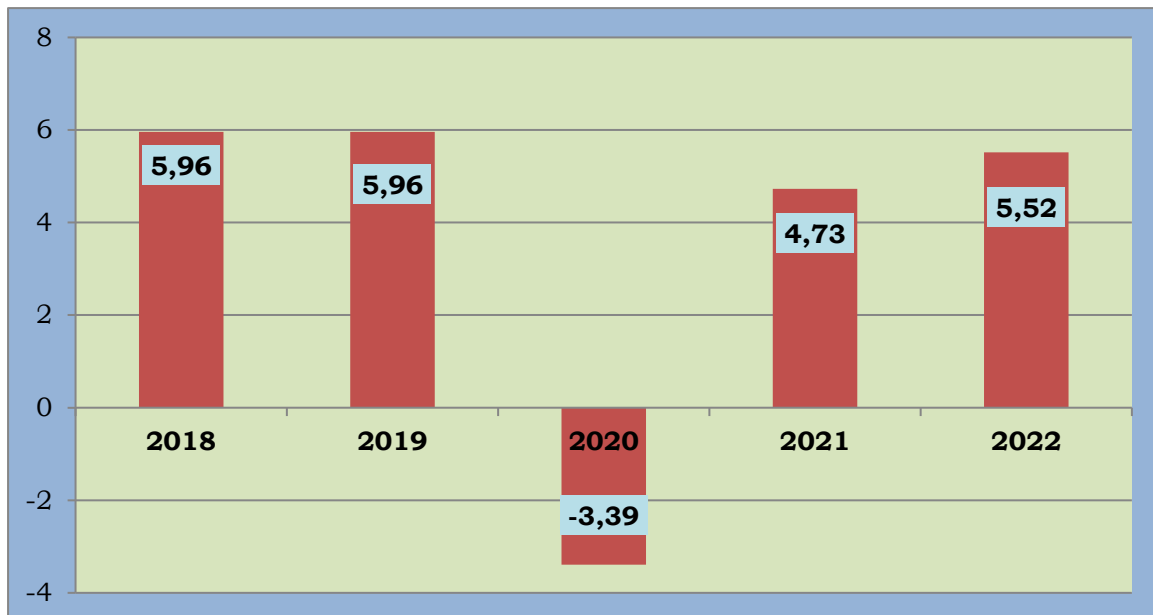
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022

1. Penguatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan;
3. Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif;
4. Percepatan Reformasi Birokrasi.

B. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini sebagai berikut :

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

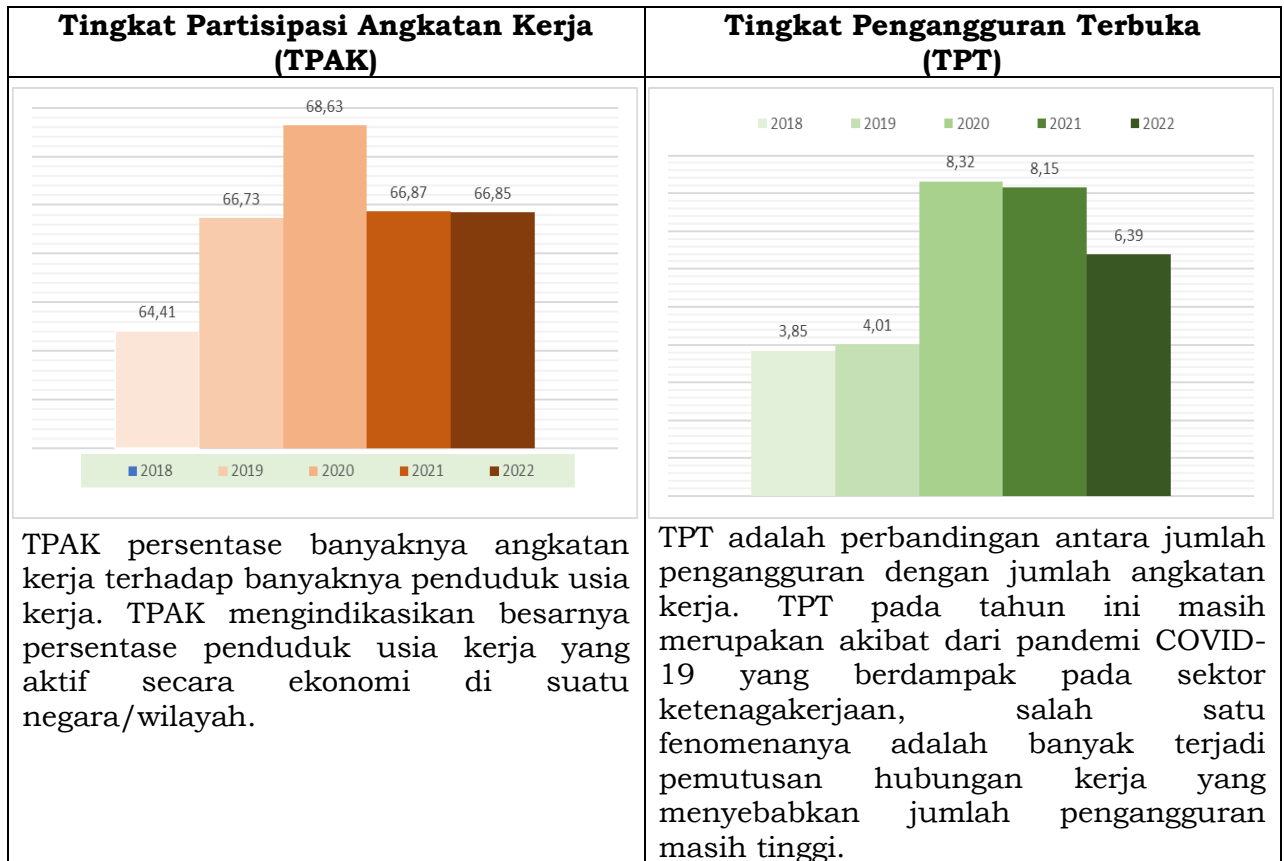


Sumber : BPS Kota Madiun

KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)

Pada Tahun 2021 Gini Ratio Kota Madiun tercatat sebesar 0,345 lebih baik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Jawa Timur sebesar 0,374. Sedangkan Tahun 2022, berdasarkan data dari *website* resmi BPS Provinsi Jawa Timur Indeks Gini Kota Madiun adalah sebesar 0,398 dan untuk Tahun 2022 Indeks Gini Jawa Timur sebesar 0,371. Berdasarkan data, kondisi ketimpangan di Kota Madiun masuk dalam kategori ketimpangan moderat.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Sumber : BPS Kota Madiun

KEMISKINAN

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2018	446.525,00	7.920	4,49
2019	478.304,00	7.690	4,35
2020	497.628,00	8.830	4,98
2021	514.409,00	9.060	5,09
2022	551.620,00	8.490	4,76

Sumber : BPS Kota Madiun

PENGELUARAN PER KAPITA

Kab/Kota	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2022
Kota Madiun	Rp 1.830.409
Kab. Magetan	Rp 1.046.174
Kab. Ponorogo	Rp 962.454
Kab. Madiun	Rp 951.547
Kab. Ngawi	Rp 847.276
Kab. Pacitan	Rp 762.720

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2023, BPS Prov. Jatim

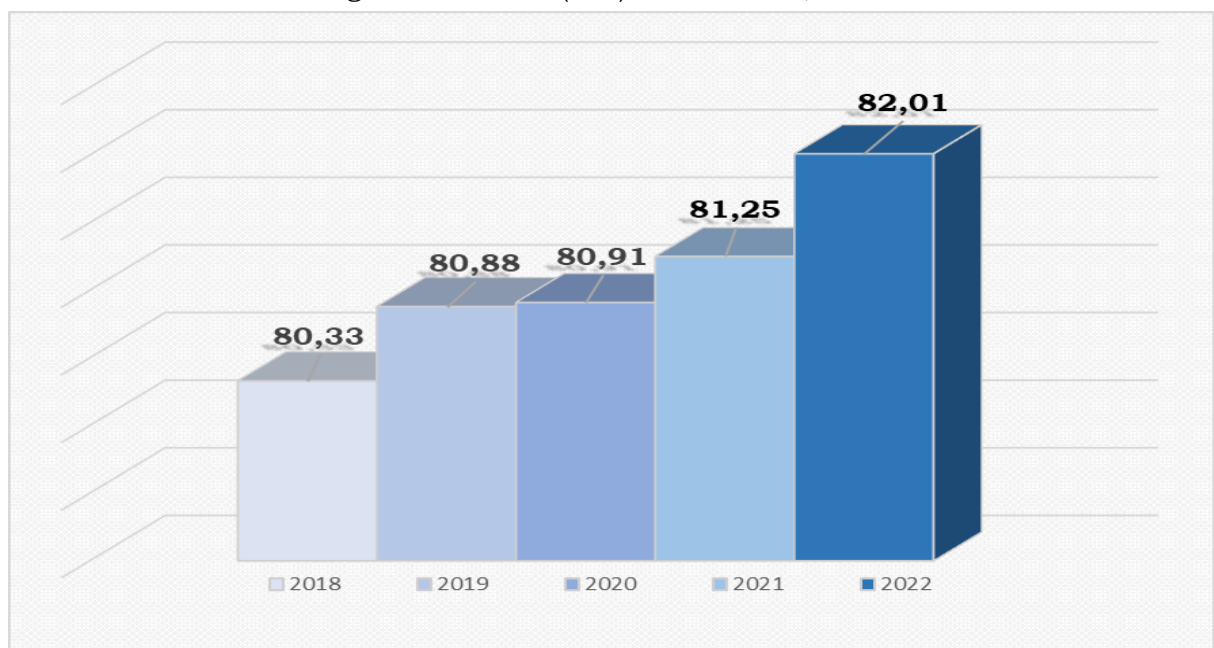
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM Kota Madiun

Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita
2018	72,59	14,21	11,10	15.616
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020	72,81	14,40	11,14	16.018
2021	72,83	14,41	11,37	16.095
2022	73,13	14,43	11,67	16.503

Sumber : BPS Kota Madiun

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun, 2018-2022



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

C. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		% Capaian		
			Target	Realisasi			
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)							
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	(B) 68	(B) 69,26	101,85%
S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	BB (71)	BB (77,15)	108,66%
		IS1.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	Sangat Tinggi	3,3805 * (sangat tinggi)	100%
		IS1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,83 (baik)	2,86 (baik)	100,35%
S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IS2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	86,50 (baik)	86,964 (baik)	100,54%
		IS2.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,6	53,96	97,05%
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan							
T.2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1	Indeks Kenyamanan Kota (livable city)	Indeks	88,19	90,33	102,43%
S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1	Indeks infrastruktur	Indeks	98,25	98,26	100,01%
S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,77	57,90	100,22%
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun							
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT.3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,70	82,01	100,38%
		IT.3.2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,44	94,42*	99,98%*
S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	14,43	100,13%
		IS5.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,39	11,67	104,66%
S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,83	73,13	100,41%
S.7	Meningkatnya	IS7.1	Indeks	Indeks	77,18	76,75*	99,44%*

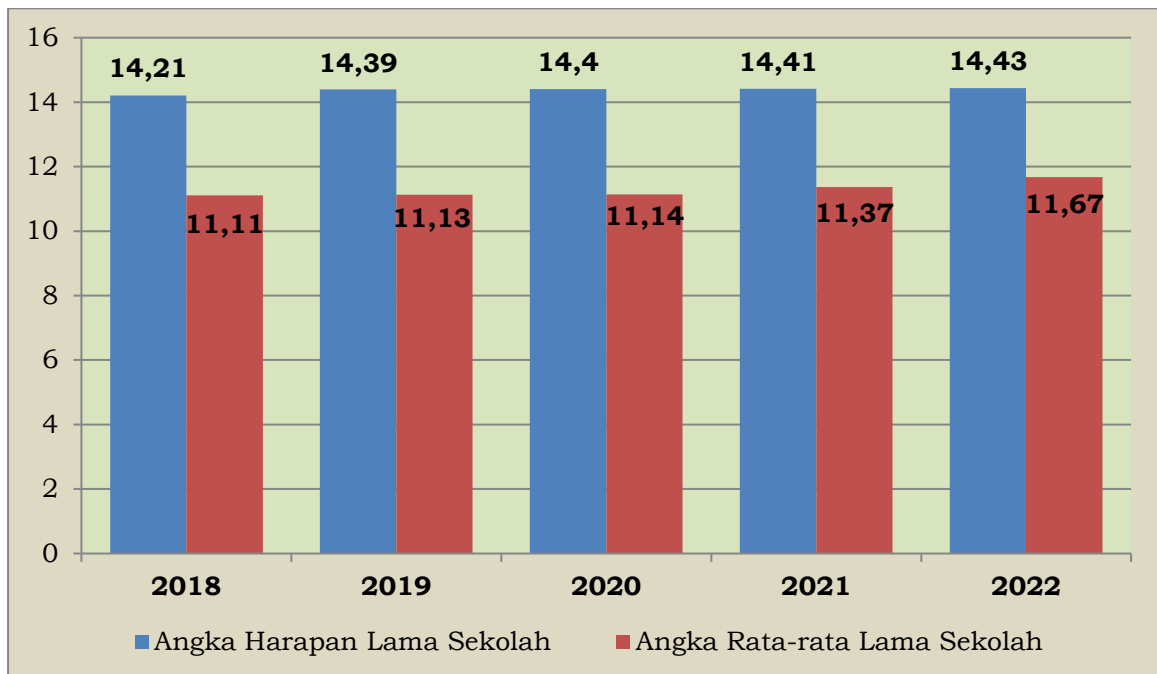
Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022		% Capaian
					Target	Realisasi	
	Pemberdayaan Gender		Pemberdayaan Gender				
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun							
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,40	6,87*	107,34%*
S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS9.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,74	6,39	88,67%
S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS8.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	10,16	7,98**	78,54%**
		IS8.2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	11,32	21,57**	190,54%**
T.5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1	Indeks Ketentraman	Indeks	77,05	81,25	105,45%
		IT5.2	Indek Gini	Indeks	0,37	0,398	92,43%
S.10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1	Angka Kemiskinan	%	5,07	4,76	106,11%
S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1	Indeks Kerukunan	Indeks	B skor 74,40 (Harmonis)	75,68	101,72
		IS11.2	Indeks rasa aman	Indeks	76,2	82,18	107,84%

D. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. URUSAN PENDIDIKAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	Dinas Pendidikan
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	

Perkembangan Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2018-2022



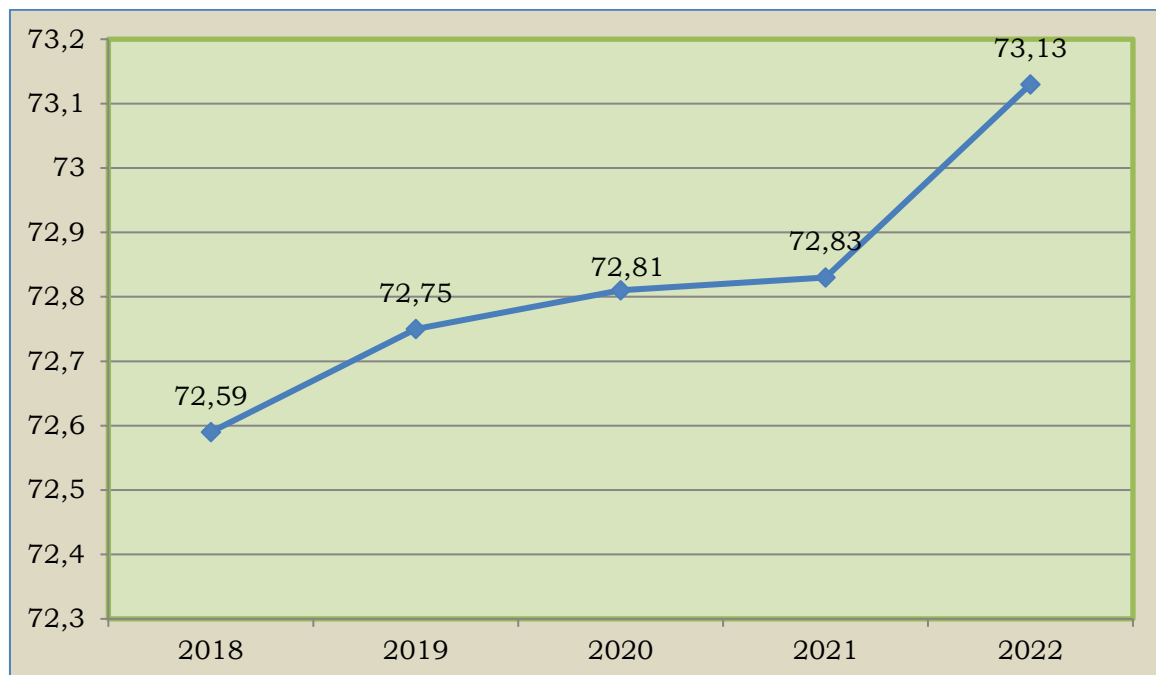
Sumber Data : Badan Pusat Statistik

2. URUSAN KESEHATAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
5.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,49%	Dinas Kesehatan dan KB
6.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	
7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	
8.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	
9.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
10.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
11.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
12.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
14.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56,23%	
15.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
16.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
17.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	
18.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	

Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun Tahun 2018-2022

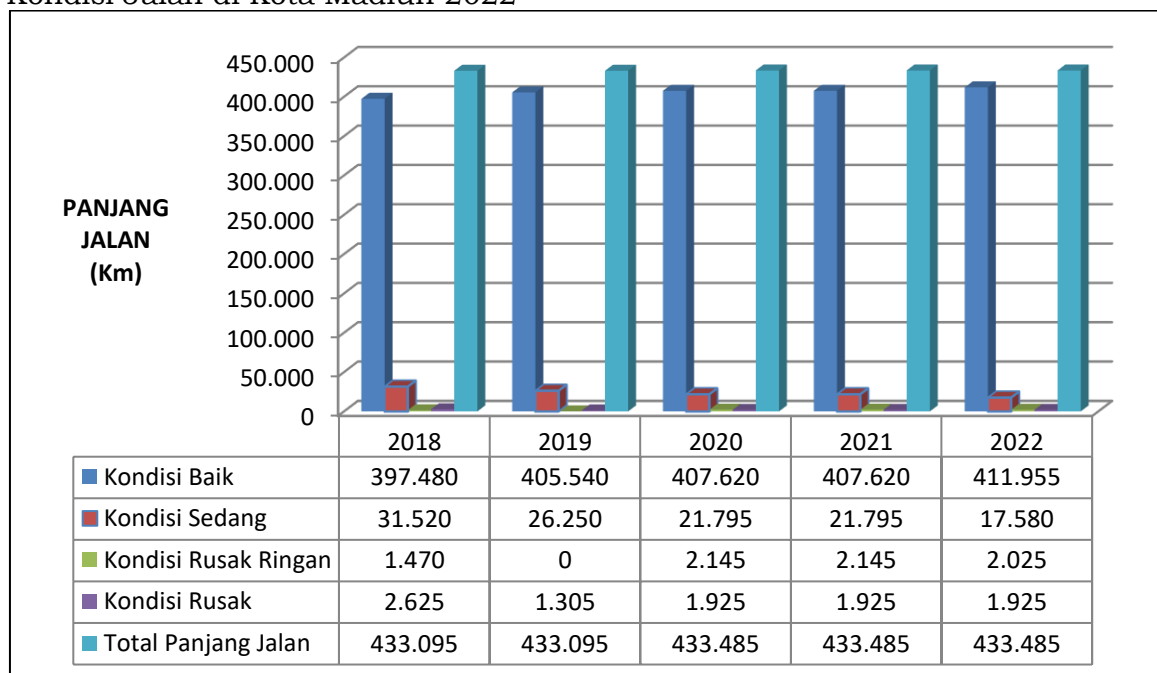


Sumber :Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
19.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	100%	DPU-PR
20.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak perlu diisi	
21.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Tidak perlu diisi	
22.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98,17%	DPU-PR
23.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,26%	DINAS PERKIM
24.	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100 %	DPU-PR
25.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	99,09%	DPU-PR
26.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	DPU-PR
27.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPU-PR

Kondisi Jalan di Kota Madiun 2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Perkim
29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	98,59%	
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0.42%	
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
33.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP dan DAMKAR
34.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	
35.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD
36.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
37.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
38.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	SATPOL PP dan DAMKAR
39.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	SATPOL PP dan DAMKAR

6. URUSAN SOSIAL

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
40.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	87,15%	Dinas Sosial PPPA
41.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	

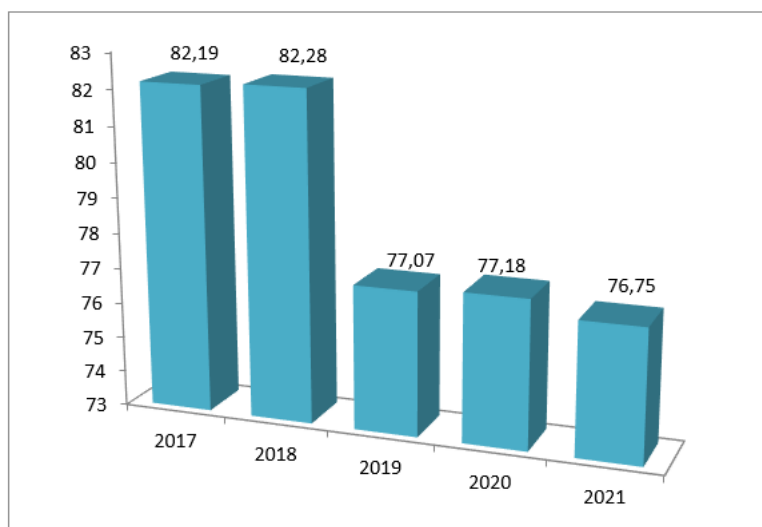
7. URUSAN KETENAGAKERJAAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
42.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	69,23%	Dinas Tenaga Kerja KUKM
43.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	69,03%	
44.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	13070,137%	
45.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	
46.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	91,76%	

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
47.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11,14%	Dinas Sosial PPPA
48.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,02%	
49.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,80	

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Madiun



Sumber Data : BPS Kota Madiun

9. URUSAN PANGAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
50.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	217,10%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

10. URUSAN PERTANAHAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
51.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perkim
52.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	
53.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	
54.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tidak perlu diisi	
55.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	
56.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
57.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	58,13%	Dinas Lingkungan Hidup
58.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	99,01%	
59.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0,0%	

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
60.	Perekaman KTP Elektronik	93,10%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
61.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	88,33%	
62.	Kepemilikan akta kelahiran	99,14%	

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
63.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	47,06%	

13. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
66.	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,94	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
67.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,32%	
68.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,74%	

14. URUSAN PERHUBUNGAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
69.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,00%	Dinas Perhubungan
70.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,34%	

15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
71.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
72.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	
73.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81,71%	

16. URUSAN KOPERASI DAN UKM

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
74.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	84,62 %	Dinas Tenaga Kerja KUKM
75.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	11,54%	

17. URUSAN PENANAMAN MODAL

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
76.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	6,06%	DPM PTSP

18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
77.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	44,47%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
78.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	47,42%	
79.	Peningkatan Prestasi Olahraga	205	

19. URUSAN STATISTIK

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
80.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
81.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	

20. URUSAN PERSANDIAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	96,74%	Dinas Komunikasi dan Informatika

21. URUSAN KEBUDAYAAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

22. URUSAN PERPUSTAKAAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
84.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2,70	Dinas
85.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,44	Perpustakaan dan Kearsipan

23. URUSAN KEARSIPAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
86.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	91,5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
87.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100%	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
88.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	101,355%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2. URUSAN PARIWISATA

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10120,58%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	54,53%	
91	Tingkat Hunian Akomodasi	63,58%	
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,127%	
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,57%	

3. URUSAN PERTANIAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
94.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	694,94%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
95.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	17,95%	

4. URUSAN PERDAGANGAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
97.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	26,46%	Dinas Perdagangan
98.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	42,28%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
99.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	103,20%	Dinas Perdagangan

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
100.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	176,04%	Dinas Tenaga Kerja KUKM
101.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0,00	
102.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	
103.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Tidak perlu diisi	
104.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Tidak perlu diisi	
105.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1.118	

FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

1. Perencanaan dan Keuangan

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	16,93	BKAD
2.	Rasio PAD	24,90	
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	Inspektorat
4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	
5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	75,44	BKAD
6.	Opini Laporan Keuangan	WTP	

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BKAD Kota Madiun

2. Pengadaan

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Bagian PBJ Adbang
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	13,63%	
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,93%	
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	1,928%	

3. Kepegawaian

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	221,05%	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,71%	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	

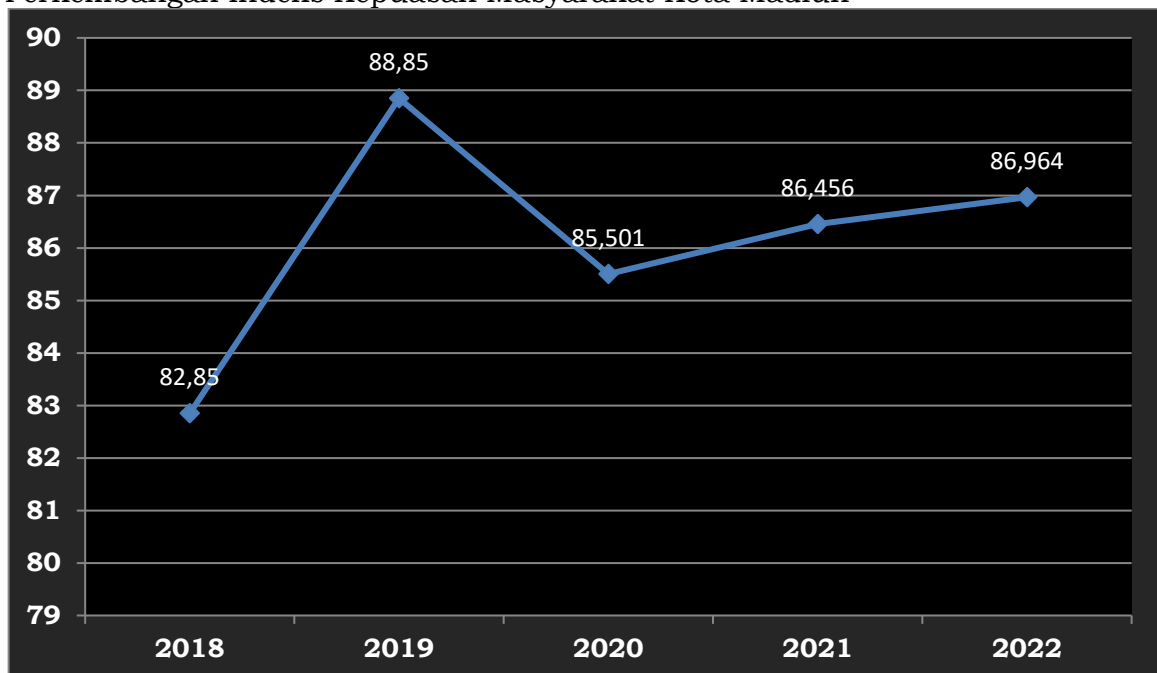
4. Manajemen Keuangan

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,59%	BKAD
2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5,54%	
3.	Manajemen Aset	4,00	
4.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	17,81%	

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

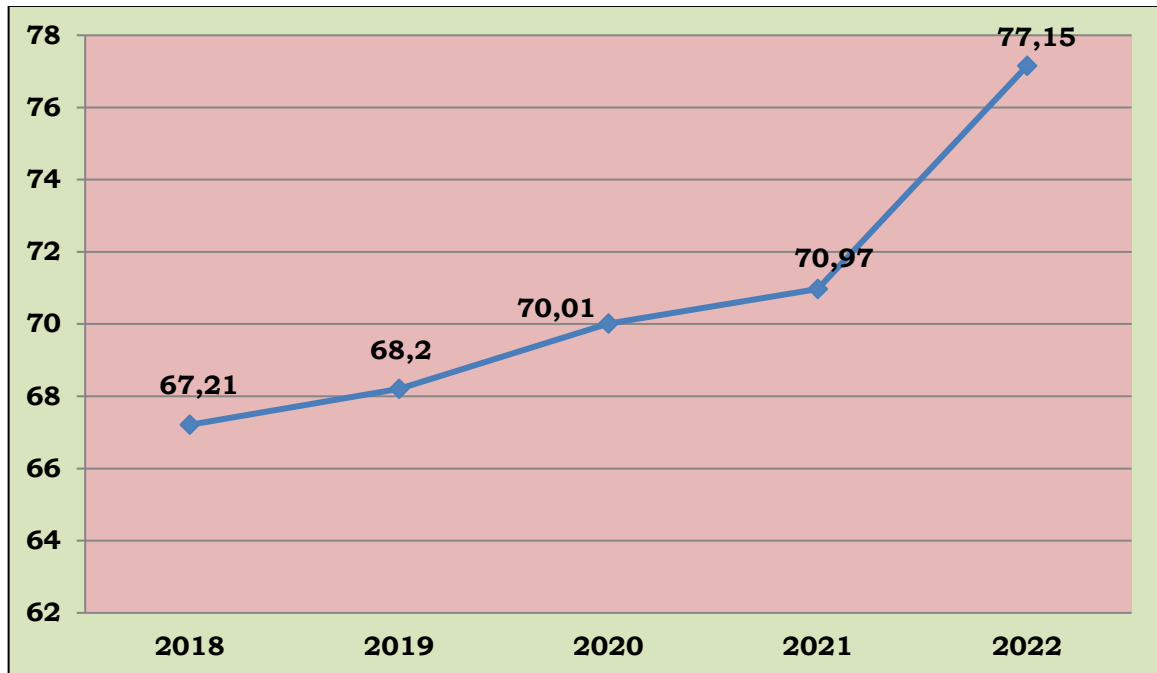
No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Dinas Kominfo
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	Dinas Kominfo

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Madiun

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Madiun

E. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1. BIDANG KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan yang tertuang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	% Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100,13%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100,53%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100,62%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	110,81%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	102,03%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	56,23%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	121,45%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	106,19%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	126,41%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	118,49%

2. BIDANG PENDIDIKAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	% Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	114,99%
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	156%
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	116,23 %

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	% Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100%

4. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	% Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98,17%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,25%

5. BIDANG SOSIAL

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	% Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	105,26 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	160,22 %
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	155,47 %
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	78,26 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	47,22 %

6. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	% Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

F. PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2022

1. Penghargaan WTP (kali kelima secara berturut) dari BPK untuk LKPD Tahun Anggaran 2022 ;
2. Green Leadership Nirwasita Tantra dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI ;
3. Penghargaan KPK RI terkait Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan Indeks Terbaik kategori Pemerintah Kota dengan nilai 83,00 ;
4. Penghargaan Peduli HAM dari Kemenkumham dengan nilai 98,5 ;
5. Dana Insentif Daerah (DID) atas Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan dari Kementerian Keuangan ;
6. Penganugerahan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya Tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
7. Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kemenpan RB Melalui Inovasi Profit M Tech (Program Wifi Gratis untuk Madiun Genggam Teknologi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun ;
8. Penganugerahan BKN Award 2022 kategori Special Mention – Pilot Project SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) ;
9. Penghargaan Indonesia Visionary Leader Kategori Best Overall Kepada Wali Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH, dari MNC Portal Indonesia ;
10. Penghargaan STBM Award tingkat Nasional kategori Kota/Kabupaten STBM Award Berkelanjutan ;
11. Penghargaan STBM Award tingkat Nasional kategori Kota/Kabupaten Penerapan Lima Pilar STBM ;
12. Penghargaan STBM Award tingkat Nasional kategori Kota/Kabupaten Terbaik STBM Berkelanjutan dimensi Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (Demand Creation) ;
13. Juara Harapan 2 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II (Wilayah Jawa dan Bali) Tahun 2022 ;
14. Penghargaan Proklamasi Utama Tingkat Nasional 2021 kepada Kelurahan Pandean dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
15. Penghargaan Proklamasi Utama Tingkat Nasional 2021 kepada RW 11 Kelurahan Taman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
16. Penghargaan Proklamasi Utama Tropis untuk RW 06 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
17. Penghargaan Proklamasi Utama Tropis untuk RW 10 Kelurahan Taman Kecamatan Taman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

18. Penghargaan Indonesia Smart Nation Award 2022 sebagai Kota Inovasi Smart Branding Terbaik-Terbaik (Best of The Best) kategori Kota ;
19. Juara 3 Digitalisasi Layanan Pelanggan Kategori Kota Sedang kepada PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) ;
20. Penghargaan ASN Achievement Award 2022 kategori Kepala Daerah peringkat Terbaik dengan predikat Pengembangan Kompetensi Berbasis SDGs Transformatif ;
21. Rekor MURI Pemasangan Sambung Tuwuh Prosesi Pernikahan Adat Terbanyak ;
22. Rekor MURI Program Pembangunan Jalan atau Pavingisasi Serentak di Lokasi Terbanyak (46 Ribu Meter) ;
23. Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2022 terkait Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kategori Baik dengan nilai 266 ;
24. Peringkat Terbaik Capaian Kinerja Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Kategori Kota se-Jawa Timur Tahun 2022 ;
25. Penghargaan Kota Sehat tingkat Provinsi Jawa Timur ;
26. Penghargaan Capaian Tambahan Imunisasi MR (BIAN). Capaian Imunisasi Tertinggi ke 4 di Jawa Timur ;
27. Penghargaan STBM 5 Pilar tingkat Provinsi Jawa Timur ;
28. Penghargaan Peringkat III dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur terkait Pemerintah Daerah atas Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik ;
29. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tingkat Provinsi Jawa Timur ;
30. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi kepada MI Al Irsyad Al Islamiyah Kota Madiun ;
31. Pembina Program Kampung Iklim Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada Walikota Madiun ;
32. Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021. Dari 70,01 pada 2020 menjadi 70,97 pada 2021 ;
33. Penghargaan sebagai Pembina K3 Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada Walikota Madiun ;
34. Penghargaan Zero Accident kepada 28 perusahaan di Kota Madiun ;
35. Penghargaan Website Pemerintah Daerah Terbaik dari Berita Jatim Award ;
36. Penghargaan atas keberhasilan Kota Madiun sebagai Pemda pertama di Jawa Timur yang menuntaskan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

37. Penghargaan Fajar Challenge 1.0 Jawa Timur untuk Forum Anak Kota Madiun Kategori Video Terinspirasi ;
38. Penghargaan Lembaga Pemerintah Terbaik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Surat Dinas dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ;
39. Penghargaan Badan Publik Layanan Permohonan Informasi Terbaik kategori Pemerintah Kota/Kabupaten dari Komisi Informasi Jawa Timur ;
40. Penghargaan Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Kota/Kabupaten dengan nilai 99,25 (Tertinggi di Jawa Timur) dari Komisi Informasi Jawa Timur ;
41. Penghargaan Sentra Pangan Jajanan/Kantin yang Memenuhi Syarat Higiene Sanitasi kategori instansi pemerintah daerah untuk Lapak Pesona Kelurahan Madiun Lor ;
42. Anugerah Kota Paling Berkelanjutan dalam bidang Tata Kelola Limbah sekaligus peringkat ke-4 Kota Paling Berkelanjutan dari total 34 peserta UI Green Metric ;
43. Penghargaan Kota/Kabupaten Terbaik Gerakan Menuju Smart City 2022 Dimensi Smart Environment ;
44. Top Digital Award dari majalah It Work kategori Top Digital Implementation 2022 Bintang 4 ;
45. Penghargaan Excellent Public Service Digitalization Initiatives Indonesia Awards 2022 oleh iNews ;
46. Juara 1 Lomba Kerapian dan Ketertiban Pasukan HUT 72 Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Timur ;
47. Juara 1 Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur ;
48. Juara 1 Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur ;
49. Terbaik II kategori Kota Dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 tingkat Provinsi Jawa Timur ;
50. Juara 1 PKK Sehat Lestari Berencana tingkat Provinsi Jawa Timur ;
51. Juara 1 Kampung KB Kategori Pemerintah Kota tingkat Provinsi Jawa Timur ;
52. Juara 1 Lini Lapangan Kategori Petugas KB ASN Pusat ;
53. Juara 1 Lini Lapangan Keluarga Lestari 20 tahun ;

PENUTUP

Demikian Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Tahun Anggaran 2022 dengan tingkat capaiannya. Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja, Pemerintah Kota Madiun sangat mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk :

1. Partisipasi stakeholder, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah ;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kota Madiun dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Madiun yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Madiun di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.

Segala saran, kritik dan masukan tentang Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Walikota Madiun Periode Tahun 2022 dari masyarakat diberikan waktu selama 30 hari dan dapat disampaikan ke Pemerintah Kota Madiun melalui :

1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun, Jalan Pahlawan No.37 Madiun
2. Email : bagpem.kotamadiun@gmail.com